

Judul : Evaluasi libur Nataru, Komisi V sepakat tingkat kepuasan naik
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Evaluasi Libur Nataru Komisi V DPR Sepakat Tingkat Kepuasan Naik

SUMBER IG PRIBADI



Lasarus

KETUA Komisi V DPR Lasarus menilai secara umum penyelenggaraan angkutan selama libur Nataru 2025/2026 menunjukkan hasil positif. Hal ini ditandai dengan penanganan dan penurunan angka korban meninggal dunia sebesar 27,12 persen dibanding tahun lalu. Juga jumlah kecelakaan pada periode Nataru ini turun sebesar 7,20 persen dibanding tahun lalu.

"Penurunan angka kecelakaan ini memberikan gambaran hasil dari rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR dan Pemerintah tentang persiapan penyelenggara Nataru per tanggal 8 Desember 2025 membuahkan hasil yang baik," puji Lasarus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Lasarus menilai, penurunan angka kecelakaan tersebut menjadi indikasi rangkaian langkah persiapan yang dilakukan Pemerintah, termasuk melalui pengawasan DPR membuahkan hasil. "Ini kita apresiasi bersama-sama," ajak politikus PDIP ini.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi menambahkan, meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi mengalami peningkatan, masih ditemukan moda transportasi yang tidak laik operasi tetap di-

operasikan. Akibatnya berujung pada kecelakaan. "Pergerakan masyarakat saat Nataru kemarin juga sangat tinggi, di atas seratus juta orang," ujarnya.

Secara umum, kata Hadi, semua pihak bisa merasakan tanggapan masyarakat lebih baik, utamanya dalam penyelenggaraan transportasi umum selama libur Nataru 2025/2026. Bahkan tingkat kepuasan pelayanan mencapai sekitar 87,6 persen.

Namun, tingginya angka kepuasan tersebut tidak boleh menutup mata terhadap sejumlah kejadian kecelakaan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan moda transportasi. "Ini sangat kita sayangkan," tegas politikus PKS ini.

Selain itu, ia menyoroti beberapa insiden yang terjadi selama libur Nataru. Seperti kecelakaan bus akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar, hingga peristiwa kapal tenggelam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat ketidaklaikan armada. "Ini menunjukkan persoalan kelayakan transportasi masih menjadi masalah serius," ucapnya.

Hadi bilang, kasus-kasus tersebut bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan gambaran masih banyaknya moda transportasi di berbagai daerah yang belum memenuhi standar keselamatan. "Di beberapa daerah lain, kita menemukan alat transportasi yang tidak layak tapi masih beroperasi," ujarnya.

Karena itu, ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah memperketat proses seleksi, pengawasan, dan penegakan aturan terhadap seluruh moda transportasi. Utamanya pada momentum dengan mobilitas tinggi seperti Nataru dan Lebaran. ■ TIF